

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungkapan laporan pertanggungjawaban perusahaan pada awalnya bersifat sukarela. Tetapi pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 dijelaskan tentang perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut ditekankan kembali pada Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai kewajiban perancangan serta pengungkapan kegiatan sosial perusahaan, baik lembaga keuangan, lembaga non-keuangan, dan emiten pasar modal.

Peraturan tersebut muncul dari maraknya praktik pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kasus pencemaran udara yang dilakukan oleh PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) kepada warga di Desa Lakardowo, Mojokerto, Jawa Timur. Warga Desa Lakardowo telah hidup berdampingan dengan limbah berbahaya hasil dari reduksi limbah medis PRIA selama satu dasawarsa (Mogabay, 2020). Pembuangan limbah beracun mengakibatkan air yang tak layak konsumsi, kandungan tanah akan logam berat yang mengakibatkan gangguan pernafasan dan kulit yang dialami oleh warga sekitar. Kasus pelanggaran tersebut telah banyak terjadi di Indonesia, untuk mengurangi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kewajiban bagi seluruh perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan serta kewajiban untuk mempublikasi pengungkapan keuangan maupun pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR).

CSR dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengkomunikasikan informasi sosial kepada *stakeholder* dan pihak eksternal. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial dinilai sebagai salah satu indikator penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata *stakeholder*. Pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial dapat

ditemukan pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan pada akhir tahun.

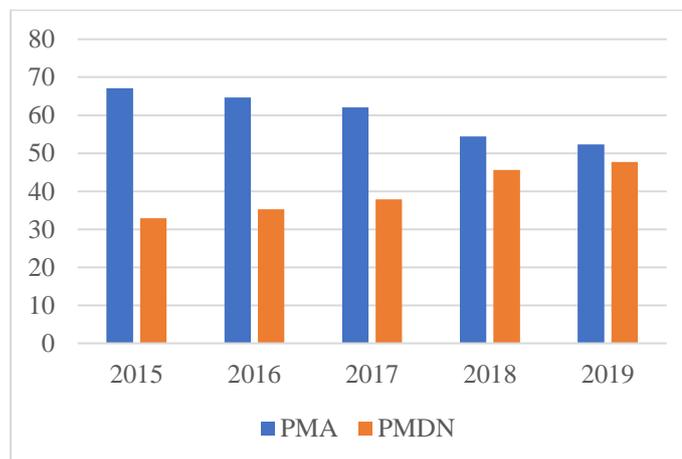
Definisi pertanggungjawaban sosial merupakan komitmen yang berkelanjutan untuk mematuhi etika bisnis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan masyarakat serta menjaga lingkungan hidup. CSR muncul sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam ekonomi konvensional konsep CSR berdasarkan pada *triple bottom lines* yakni finansial (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Konsep tersebut cenderung memiliki hubungan secara horizontal antar masyarakat, finansial dan lingkungan. Akan tetapi, banyak yang belum mengetahui bahwa konsep CSR tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. Dalam konsep tanggung jawab sosial berbasis syariah, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sosial. Hubungan yang digunakan tidak hanya berfokus kepada hubungan horizontal tetapi juga vertikal. Hubungan horizontal berupa hubungan antar makhluk hidup dan hubungan vertikal berupa hubungan dengan penguasa alam semesta yaitu, Allah SWT. Maka pertanggungjawaban tidak hanya kepada OJK selaku pengawas kegiatan jasa keuangan tetapi juga kepada Allah sebagai penguasa alam semesta.

Tanggung jawab sosial Islam juga harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan syariah secara keseluruhan, yaitu untuk mendorong kebaikan (keadilan) dan melarang kejahatan (ketidakadilan), yang dimanifestasikan dalam konsep melindungi iman, kehidupan, intelek, keturunan, dan kekayaan umat manusia. Konsep CSR dalam ekonomi Syariah meningkatkan kesadaran terhadap institusi berbasis syariah. Namun dalam standar pengungkapannya perusahaan syariah saat ini masih menggunakan standar pengukuran konvensional yaitu, *Global Reporting Initiative Index* (GRI Indeks) dan *CSRDI* (*Corporate Social Responsibility Disclosure Index*). Sedangkan AAOFI (*Accounting and Auditing of Islamic Financial Institutions*) telah menetapkan standar pengukuran syariah yang bernama *Islamic Social Reporting* (ISR).

Penggunaan pengukuran konvensional sangat disayangkan karena terdapat item-item yang tidak relevan dan tidak masuk hitungan dengan prinsip Islam seperti zakat, infaq dan laporan nilai tambah perusahaan. Hal ini dapat mengganggu penilaian para pembuat keputusan muslim dan berdampak buruk pada kebutuhan spiritual mereka (Haniffa, 2002). Pemilik bisnis syariah seharusnya melakukan segala kegiatan operasional sesuai dengan prinsip Islam termasuk dalam pengungkapan CSR yang akan berdampak pada pandangan dari pemangku kepentingan. Haniffa dan Hudaib (2002) menyarankan bahwa informasi yang relevan dan pengungkapan penuh dalam laporan tahunan dapat digunakan untuk membantu para pemangku kepentingan muslim dalam menentukan keputusan ekonomi dan agama, serta mendukung manajemen dalam memenuhi akuntabilitas mereka kepada Allah SWT dan masyarakat. Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip *full disclosure* yang bertujuan untuk kepentingan publik. Dalam konteks Islam masyarakat berhak mengetahui dampak kegiatan perusahaan terhadap kegiatan mereka, dan mempertimbangkan aturan Syariah jika tujuan tersebut telah terpenuhi (Lestari, 2013).

Di Indonesia pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan masih belum memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman untuk mengukur kinerja perusahaan dalam membuat laporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan aspek religi. *Islamic Social Reporting* pertama kali dikemukakan oleh Prof. Rozaini Haniffa pada tahun 2002 melalui penelitiannya yang berjudul *Social Reporting Disclosure An Islamic Perspective*. Kemudian penelitian tersebut dikembangkan oleh Othman et al., (2009) melalui jurnal yang berjudul *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia* dengan menambahkan tema tata kelola perusahaan. Sehingga dalam ISR terdapat enam tema pengungkapan yakni, tema pembiayaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, tema lingkungan dan tema tata kelola perusahaan. Di dalam tema tersebut terdiri dari sub tema yang akan digunakan sebagai item pengungkapan CSR.

Pengungkapan CSR memiliki faktor yang mempengaruhi terkait besar kecilnya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, baik penanaman modal domestik maupun asing. Dalam pasal 15 (b) dijelaskan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, apabila tidak maka akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 34 (Fauziah dan J, 2013). Sehingga setiap investor asing maupun domestik diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan yang diatur pemerintah. Chow et al., (1987) menyatakan pengungkapan baik finansial maupun sosial digunakan untuk mengelola konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditur dan manajemen (Putra et al., 2011). Tak terkecuali dalam struktur kepemilikan, investor asing dan domestik memiliki pandangan yang berbeda dalam kegiatan sosial perusahaan. Pertumbuhan investor asing dan domestik di Indonesia disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1

Realisasi Penanaman modal PMDN-PMA

(Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal RI)

Dari Gambar 1.1, penanaman modal asing (PMA) selama lima tahun terakhir mengalami penurunan secara pasti. Sebaliknya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa kepemilikan domestik mulai memiliki ketertarikan dalam melakukan investasi di dalam negeri. Sebagaimana dalam penelitian Suto dan

Takehara (2012) menemukan bahwa struktur kepemilikan dalam perusahaan merupakan salah satu elemen esensial dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Hart dan Moore (1990); Finkelstein (1992) berasumsi bahwa kepemilikan memiliki pengaruh terhadap perancangan keputusan organisasi, motivasi, dan kekuasaan. Pemilik perusahaan memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan diambil demi tercapainya visi dan misi perusahaan tak terkecuali, dalam kegiatan CSR.

Selain variabel struktur kepemilikan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Blowfield & Murray (2008); Heal (2005) berpendapat bahwa CSR merupakan dampak kinerja perusahaan terhadap manusia dan lingkungan dengan menjaga profit agar perusahaan tetap berjalan. CSR dapat digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan (Henderson, 2010); berkontribusi terhadap diferensiasi produk di pasar ekspor dan meningkatkan kinerja ekspor (Boehe dan Cruz, 2010); meningkatkan daya saing industri manufaktur (Flammer, 2013) serta dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan kepuasan pelanggan (Lev et al., 2010). Semakin besar profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Bukan hanya profitabilitas ukuran perusahaan juga berpengaruh dalam kegiatan sosial perusahaan.

Akbar (2017) berpendapat bahwa, perusahaan besar memiliki sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga mendapatkan pinjaman dari kreditur akan lebih mudah karena perusahaan besar memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bersaing atau bertahan di industri. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki keuntungan yang besar pula. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang wajib diungkapkan kepada *stakeholder* baik informasi keuangan maupun informasi tanggung jawab sosial (Irmadariyani et al., 2019). Sehingga, salah satu cara untuk mendapatkan perhatian *stakeholder* yaitu dengan melakukan kegiatan sosial sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, hasil dari

penelitian ini dapat dipergunakan oleh perusahaan sebagai informasi untuk meningkatkan kegiatan sosial yang komperhensif.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terbaru menemukan bahwa kepemilikan perusahaan asing memiliki hubungan yang lebih positif dengan kinerja sosial yang komperhensif daripada kepemilikan domestik (Suto & Takehara, 2012); (Tokas, 2020). Berbanding terbalik dengan penelitian El-Gazzar (1998), semakin tinggi kepemilikan domestik, maka semakin tinggi pula tekanan akan pengungkapan sosial yang lebih luas (Putra et al., 2011). *Stakeholder* tertentu (pemerintah dan kreditor) memiliki dampak terhadap publikasi laporan CSR yang artinya terdapat campur tangan politik di dalamnya (Prado-Lorenzo, 2009; Li, 2010). Berlawanan dengan penelitian Schadewitz dan Blevins (1998) dan Hossain et al., (2006) yang menemukan terdapat hubungan kontradiktif antara kepemilikan domestik dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Mazri (2018); Rohana Othman et al., (2009); Akbar (2017) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dan atribut perusahaan (ukuran dewan direksi, kualitas audit, komite audit dan kepemilikan muslim) memiliki pengaruh positif terhadap ISR. Sebaliknya, profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap ISR. Dalam penelitiannya Lee (2016), Xu (2016) menjelaskan terdapat hubungan positif antara kepemilikan oleh negara dan profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial. Hal tersebut berlawanan dengan penelitian Nohong (2019) dan Irmadariyani et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berhubungan dengan pengungkapan ISR. Irmadariyani et al., (2019), Ousama dan Fatima (2006), Ho dan Mathews (2002), Mohd Shatari et al. (2004) mendapati ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Temuan ini tidak konsisten dengan Murtanto dan Elvina (2004) dan Nooraisah (2004) yang mendapati ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan.

Penelitian pengungkapan CSR dengan menggunakan ISR indeks sebagai alat ukur terbilang masih jarang di Indonesia. Literatur mengenai kepemilikan perusahaan (ownership) domestik dan asing terhadap ISR masih terhitung minim.

Dari penelitian sebelumnya variable-variabel struktur kepemilikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan yang dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan pengukuran Islam menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian besar objek kajian yang diteliti berupa Bank Syariah, sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara luas. Sebagian besar teknik analisis menggunakan regresi berganda pada penelitian ini digunakan regresi data panel untuk menguji hipotesis. Maka dari itu peneliti ingin meneliti mengenai **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*”** Penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan sampel yang digunakan sebanyak 13 perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* tahun 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial dan simultan terhadap *Islamic social reporting* pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2015-2019.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kepada 13 perusahaan terdaftar dalam JII pada tahun 2015-2019. Teknik analisis menggunakan regresi data panel. Variabel dependen berupa *Islamic Social Reporting* indeks dan variabel independen berisi struktur kepemilikan (domestik dan asing), profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan olah data menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji hipotesis yang telah disusun. Variabel independen struktur kepemilikan yang dibagi menjadi kepemilikan domestik dan asing, di mana kepemilikan domestik berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Variabel independen profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2015-2019. Struktur kepemilikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan memengaruhi *Islamic Social Reporting*.

1.6 Kontribusi Penelitian

1. Bagi regulasi, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber referensi untuk pengembangan standar pengungkapan sosial Islam (ISR) dan dapat digunakan sebagai alat ukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengingat akan kesadaran dalam melakukan tanggung jawab sosial secara syariah.
3. Bagi akademisi dan peneliti, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan khasanah pengetahuan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya agar penelitian dapat lebih komprehensif.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai struktur kepemilikan (kepemilikan domestik dan kepemilikan asing), profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Di dalamnya mencakup kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset dan uji ketahanan dari hasil penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Landasan teori akan membahas mengenai JII, *stakeholder* teori, agensi teori, *corporate social responsibility* (CSR), *Islamic social reporting* (ISR), struktur kepemilikan (kepemilikan domestik dan kepemilikan asing), profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting* serta landasan teori mengenai hubungan antar variabelnya. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, hubungan antara variabel

independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, model penelitian, serta metode dalam menganalisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai penjelasan dari hasil analisis statistik yang dilakukan beserta interpretasi hasil penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini menyatakan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya.